

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah mempunyai kewenangan yang disebut hak Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemberian hak otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah tersebut juga mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah (Ramadhan dkk., 2023). Dalam membuat anggaran daerah tentu saja membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan strategis untuk jangka waktu panjang. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan evaluasi kinerja anggaran tahun sebelumnya agar dapat menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki otoritas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik yang semakin dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik pada organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, kementerian dan lembaga-lembaga negara. Sumber daya keuangan harus dikelola dan digunakan dengan sebaik mungkin oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, analisis kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana Pemerintah Daerah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Menurut (Sarsiti, 2020), pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat atau menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat mengetahui kemajuan organisasi dalam meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan di dalam suatu organisasi, tidak hanya organisasi swasta namun juga organisasi pemerintahan. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja pada sektor publik dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Apabila tidak dilakukan analisis mengenai kinerja keuangannya, ada risiko terjadi penyalahgunaan dana publik yang sulit dideteksi.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan ukuran untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan. Akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan untuk memverifikasi bagaimana dana publik digunakan, tetapi juga mencakup kapasitas untuk menunjukkan bahwa dana publik tersebut telah digunakan dengan cara yang ekonomis, efisien dan efektif. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk memberikan kerangka evaluasi yang menyeluruh terhadap pencapaian tujuan dan efisiensi operasional dalam penyelenggaraan layanan publik. Melalui pengukuran kinerja, sektor publik dapat secara sistematis menilai sejauh mana program-program dan kebijakan yang diterapkan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan (Judijanto & Afandy, 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD berisi rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah berupa perkiraan pendapatan dan belanja daerah. APBD dibuat berdasarkan kebutuhan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan terhadap kinerja keuangan di lingkungan pemerintahan daerah untuk mengetahui seberapa berhasil pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat menjadi faktor penting dalam penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

LKPD dapat menunjukkan kinerja keuangan serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai serta mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di daerah masing-masing.

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Pulau Sumatera yang mempunyai luas sebesar 49.026,579 km² yang merupakan 2,59 persen dari total luas wilayah Indonesia dan 10,30 persen dari total luas wilayah Sumatera. Provinsi Jambi memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Ibu Kota dari Provinsi Jambi adalah Kota Jambi. Kabupaten Merangin merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu sebesar 7.540,118 km² dan Kota Jambi memiliki luas wilayah terkecil yaitu sebesar 169,887 km². Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2022 tercatat sebanyak 3,63 juta jiwa (BPS, 2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Provinsi Jambi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2015-2023 (BPK, 2024). Artinya, laporan keuangan Provinsi Jambi telah dianggap sesuai standar dan bebas dari kesalahan material. Namun, opini WTP pada Provinsi Jambi tidak otomatis mencerminkan kualitas laporan keuangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama. Setiap Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sendiri dan akan diaudit secara terpisah oleh BPK.

Opini Audit BPK memiliki peran yang penting untuk mengukur kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil dari pemeriksaan BPK ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Opini ini akan menunjukkan sejauh mana laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah mengungkapkan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Menurut (bpk.go.id, 2023), opini audit BPK menjadi indikator kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah, karena opini yang lebih baik biasanya menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi serta manajemen keuangan yang efektif. Opini ini dapat meningkatkan atau menurunkan

tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pelaporan yang disajikan oleh entitas yang diaudit

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang baik juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan meningkatkan modal bagi Pemerintah Daerah yang akan membantu mewujudkan dan meningkatkan kinerja yang baik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Sunandar, 2023). Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika suatu daerah mengalami peningkatan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akumulasi modal dan lainnya. Apabila faktor-faktor tersebut dapat ditingkatkan dan dicapai, maka akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi terjadi karena daerah memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan potensi daerah. Sebaliknya, daerah yang mengalami penurunan ekonomi menunjukkan bahwa kemampuan daerah tersebut dalam mengembangkan potensi daerah sangat terbatas. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berhasil mengurangi pengangguran, kemiskinan serta mengurangi tingkat ketergantungan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga memiliki dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana PAD merupakan salah satu sumber utama biaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan daerahnya.

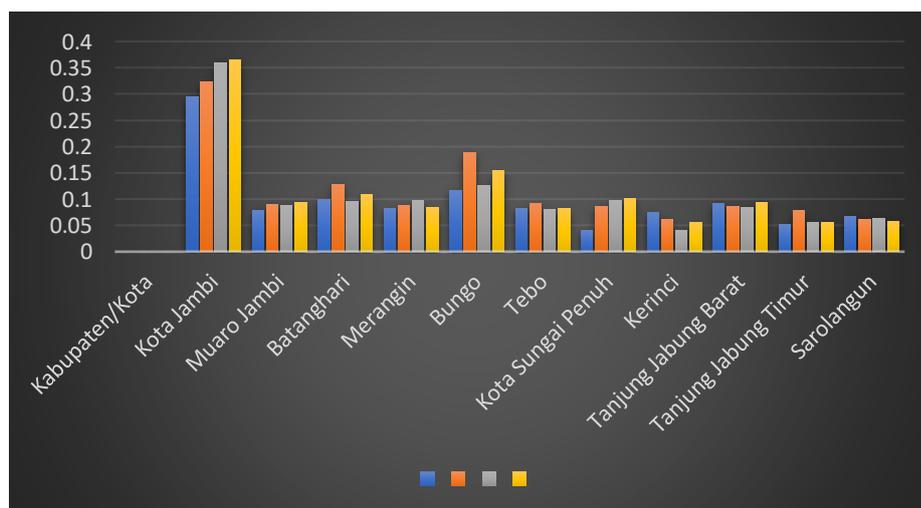
Berikut ini merupakan data mengenai tingkat kemandirian daerah untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah mampu mendanai kebutuhan daerahnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Adapun data yang diambil berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023 yang telah diolah.

Tabel 1. 1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Periode 2020-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi				Keterangan
	2020	2021	2022	2023	
Kota Jambi	29%	32%	35%	0,36	Rendah
Muaro Jambi	7%	9%	8%	0,09	Rendah sekali
Batanghari	9%	12%	9%	0,10	Rendah sekali
Merangin	8%	8%	9%	0,08	Rendah sekali
Bungo	11%	18%	12%	0,15	Rendah sekali
Tebo	8%	9%	8%	0,08	Rendah sekali
Kota Sungai Penuh	4%	8%	9%	0,10	Rendah sekali
Kerinci	7%	6%	4%	0,05	Rendah sekali
Tanjung Jabung Barat	9%	8%	8%	0,09	Rendah sekali
Tanjung Jabung Timur	5%	7%	5%	0,05	Rendah sekali
Sarolangun	6%	6%	6%	0,05	Rendah sekali

Sumber: LHP LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Data diolah 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah dan rendah sekali. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan dalam (Indriyani dkk., 2023) terkait kriteria kemandirian daerah. Hal ini membuktikan semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat.



Gambar 1. 1

Grafik Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2020-2023

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan gambar 1.1 mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki tingkat kemandirian keuangan dalam kategori yang rendah dan rendah sekali. Kota Jambi memiliki tingkat kemandirian yang rendah yaitu di antara 25% hingga 50%. Sedangkan 10 Kabupaten/Kota lainnya memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah sekali yaitu di antara 0% hingga 25% (Indriyani dkk., 2023).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk diteliti untuk melihat bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2020-2023. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih dalam kategori rendah dan rendah sekali yang menunjukkan daerah masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Sehingga hal ini perlu diteliti untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Adapun beberapa variabel yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2023 adalah Kemakmuran, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit BPK.

Analisis kinerja keuangan dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik bagi manajemen dalam merencanakan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja keuangan pada periode berikutnya. Bagi entitas publik, analisis kinerja keuangan dapat menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas mengenai bagaimana keuangan daerah digunakan. Pengukuran kinerja keuangan dapat melihat apakah alokasi dan realisasi anggaran berjalan secara efektif dan efisien khususnya dalam mencapai program pembangunan daerah. Pengukuran kinerja keuangan ini juga bisa memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan fiskal, termasuk dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah yang sangat krusial bagi kemandirian keuangan daerah. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah lebih terdorong untuk meningkatkan kinerja.

Beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini seperti penelitian oleh (Millenia, 2022) menunjukkan bahwa Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah sedangkan menurut (Satria & Sari, 2018) Kemakmuran tidak berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah. Kemudian menurut (Satria & Sari, 2018) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah sedangkan menurut (Millenia, 2022) Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian penelitian oleh (Heryanti dkk., 2019) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah sedangkan menurut (Ridho, 2021) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian penelitian oleh (Satria & Sari, 2018) menunjukkan bahwa Opini Audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah sedangkan menurut (Pratama dkk., 2022) Opini Audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek penelitian akan dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kemudian penelitian ini menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Alasan menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah karena secara teoritis, Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan meningkatkan modal bagi Pemerintah Daerah yang akan membantu mewujudkan dan meningkatkan kinerja yang baik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Sunandar, 2023). Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi masih cukup jarang digunakan sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih signifikan. Perbedaan selanjutnya terletak pada periode penelitian, penelitian ini melakukan perkembangan tahun yaitu tahun 2020-2023 sehingga data merupakan yang terbaru dan memberikan hasil yang baru.

Adapun beberapa variabel yang akan digunakan pada penelitian kali ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023 yaitu menggunakan Kemakmuran, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit BPK. Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat membantu khalayak untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023. Pemerintah daerah juga dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul penelitian **“Pengaruh Kemakmuran, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2020-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kemakmuran, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit BPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023?
2. Apakah Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2020-2023?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023?

5. Apakah Opini Audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kemakmuran, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Opini Audit BPK secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kemakmuran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Opini Audit BPK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti memahami efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keahlian peneliti dalam melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah serta mengembangkan

keterampilan dalam mengolah dan menganalisis data keuangan daerah serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan informasi tentang kondisi keuangan daerah secara objektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memacu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi pelengkap ataupun pembanding dari berbagai penelitian terdahulu dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga menyediakan referensi empiris yang dapat memperkuat literatur yang digunakan dalam penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.